

**PENGARUH TEKANAN, KEEFEKTIFAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, PERILAKU TIDAK ETIS, DAN JABATAN DALAM
PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP *FRAUD*
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro)**

(Tesis)

Oleh :

ARDI IRPHANI



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGARUH TEKANAN, KEEFEKTIFAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PERILAKU TIDAK ETIS, DAN JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP *FRAUD*

oleh:

ARDI IRPHANI

Tindakan korupsi pada pemerintahan yang menjadi bagian dari *fraud* dalam akuntansi, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Pada pemerintah Kota Metro, korupsi yang terjadi merambah hingga sektor pendidikan seperti pembangunan sekolah dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam teorinya *Fraud Diamond* menyebutkan faktor-faktor penyebab *fraud* (korupsi) terdiri dari: *incentive/ pressure, opportunity, rationalization*, dan *capability*. Mengacu pada teori tersebut, peneliti memproksikan kedalam 4 variabel yaitu tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan. Penelitian dilakukan melalui metode *confirmatory research* pada pegawai/pejabat yang bekerja pada pengelola keuangan daerah (PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu) dengan mendistribusikan kuesioner pada 34 SKPD yang ada di Kota Metro. Dari 340 kuesioner yang didistribusikan, yang dikembalikan dan dapat diolah sebanyak 231 kuesioner (72.06 %). Analisa data yang digunakan adalah SEM (*Simultaneous Equation Model*) dengan bantuan *software* Lisrel 8.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel yang diuji semua berpengaruh signifikan terhadap *fraud*. Hasil tersebut membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab *fraud* dalam *Fraud Diamond Theory* (Wolfe dan Hermanson, 2004) terbukti menjadi penyebab *fraud* di Pemerintah Daerah Kota Metro. Selain menguji keempat variabel diatas, peneliti juga menguji saran yang dikemukakan Gbegi dan Adebisi (2013) melalui analisis tambahan untuk menemukan *New Fraud Diamond Model*. Setelah dilakukan analisis bahwa tekanan secara signifikan memoderasi hubungan antara jabatan dalam pengelola keuangan terhadap *fraud* dan keefektifan sistem pengendalian internal secara signifikan memoderasi hubungan antara perilaku tidak etis terhadap *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro untuk mengkaji kembali besaran tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai, melakukan *fraud risk assessment* secara berkala, pejabat diharapkan dapat memberikan contoh keteladanan yang baik kepada bawahannya, serta mensyaratkan pegawai yang akan menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan memiliki sertifikat pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan mengklasifikasikan kelompok jabatan dalam distribusi dan pengolahan data kuesioner, sehingga hasil yang didapat dapat menggambarkan hasil yang maksimal.

Kata kunci: *tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, jabatan dalam pengelola keuangan, fraud.*

ABSTRACT

THE INFLUENCES OF PRESSURE, THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS, UNETHICAL BEHAVIOR, AND POSITION IN RESOURCE MANAGERS, AGAINST FRAUD.

by:

ARDI IRPHANI

The condition of corruption in government which is a part of the fraud in accounting, became worse nowadays. In Metro government, the corruption extended to the education sector such as construction of schools and school operational assistance (BOS).

Wolfe and Hermanson (2004) in their theory Fraud Diamond mention factors that cause fraud (corruption) consists of: incentive/pressure, opportunity, rationalization, and capability. According to the theory, the researcher use four variables which are the pressure, the effectiveness of internal control systems, unethical behavior, and positions in financial manager. This research was conducted through confirmatory research method on the employees/officials who work in the area of financial managers (PA/KPA, PPK, PPTK, Expenditure Treasurer/Assistant Expenditure Treasurer) by distributing questionnaires to 34 SKPD in Metro. From 340 questionnaires which had distributed, a total of 231 (72.06%) questionnaires were returned and can be processed. Data were analyzed by using SEM (Simultaneous Equation Model) and supported by software Lisrel 8.8. The results show that all variables have significant effect on fraud. These results prove that the factors that cause fraud in Fraud Diamond Theory (Wolfe and Hermanson, 2004) proved to be the cause of fraud/corruption in the regional Metro Government. In addition, the researcher also tried to test the suggestions of Gbegi and Adebisi (2013) through additional analysis to find New Fraud Diamond Model. After doing the analysis, it was found that the pressure significantly moderate the relationship between positions in financial managers against fraud and the effectiveness of internal control systems significantly moderate the relationship between unethical against fraud.

Based on this results, the researcher suggest to the Metro Government to review the amount of allowances and additional employee income, do fraud risk assessments continuously, superiors are expected to be good role model to their subordinates, and every employees who will occupy positions in the structure of government must have a certificate of training and anti-corruption education. Suggestions for next research is to do research by classifying the position group in the distribution and processing of questionnaire, so the results obtained can describe the maximum results.

Keywords: pressure, the effectiveness of internal control systems, unethical behavior, position in resource managers, fraud.

**PENGARUH TEKANAN, KEEFEKTIFAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, PERILAKU TIDAK ETIS, DAN JABATAN DALAM
PENGELOLA KEUANGAN TERHADAP *FRAUD*
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Metro)**

TESIS

Oleh :

ARDI IRPHANI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapat Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **PENGARUH TEKANAN, KEEFEKTIFAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
PERILAKU TIDAK ETIS, DAN JABATAN
DALAM PENGELOLA KEUANGAN
TERHADAP FRAUD**

Nama Peneliti : **ARDI IRPHANI**

No. Pokok Mahasiswa : **1421031046**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Susi Sarumpaet, S.E, M.B.A, Ph.D., Akt

NIP. 19691008 199501 2 001

Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19700817 199703 2 002

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Susi Sarumpaet, S.E, M.B.A, Ph.D., Akt

NIP. 19691008 199501 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A, Ph.D., Akt**

Sekretaris : **Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.**

Penguji Utama : **Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**

Sekretaris Penguji : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19580528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian: 18 Januari 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardi Irphani
NIM : 1421031046
Jurusan/Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya dari orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang dirujuk dalam tesis ini telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bandar Lampung, 24 Januari 2017
yang membuat pernyataan,


Ardi Irphani

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Metro Provinsi Lampung, pada tanggal 29 Juli 1987 anak keempat dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Syahlan Asnawi Bin Asnawi (Alm) dan Ibu Sri Haryati Binti Karyorejo. Alamat tempat tinggal saat ini di Kota Metro Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Kota Metro, lulus tahun 1999. SMP Negeri 1 Kota Metro lulus tahun 2002. SMU Negeri 1 Kota Metro lulus tahun 2005. S1 Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XVIII Jatinangor lulus tahun 2009.

Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui Program Beasiswa STAR BPKP Batch II.

MOTTO

***Berikhtiar, berdo'a, bersabar dan
bersyukur adalah
tak akan sia-sia
dan semua akan indah
pada waktunya....***

(Rahma)

*Dengan kuasa ALLAH SWT yang selalu memberikan
Rahmat dan Karunia-Nya...*

Untuk itu Keberhasilan ini Ku-persembahkan kepada:

Ibunda tercinta...

*Sumber mata air, semangat yang tak pernah kering, yang tulus ikhlas
selalu berdo'a demi keselamatan dan keberhasilan putranya.*

*Ayahanda tercinta... yang meninggalkan segala ilmu yang baik,
mendidik sifat yang santun, serta menyisakan semangat akan
perubahan hidup yang selalu penulis rindukan...*

*Istriku tercinta Rahma yang dengan kasih sayangnya selalu setia
menemani, membantu, mendukung dan memotivasi penulis dalam
menyelesaikan tesis ini.*

Putriku Nadira Fayyaza Irphani dan

Putraku Ibrahim Avicenna Irphani

yang selalu menjadi penyemangat dan penggembira suasana.

serta...

Universitas Lampung dan

Institusi BPKP melalui Program STAR-nya

terima Kasih untuk kesempatan terhebat yang pernah penulis dapatkan.

LOVE YOU ALL

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahilalamin Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis dengan judul **“Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap *Fraud*”** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Lampung.
4. Ibu Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Pembimbing I atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran pada proses penyelesaian tesis ini.

5. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt selaku Pembimbing II atas kesediaan waktu dan pemikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran pada proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt selaku penguji utama.
7. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. dan Bapak Usep Syaifudin S.E, M.Si., selaku sekretaris penguji.
8. Staf administrasi MIA UNILA Mas Andri Kasrani dan MbK Leni.
9. Sahabat-sahabat terbaikku di Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch II, Aan, Aatina, Barokatun, Dharma, Efan, Feri, Fitnov, Haris, Heny, Hesty, Icol, Liya, Mira, Narni, Nunung, Novita, Ryan, Sugi, Suwarso, Soleh, Puji, Taufik, Yayan, Yeti, semoga kita bisa menjadi abdi negara yang dapat membangun dan memperbaiki bangsa Indonesia....AMIN
10. Keluarga Besar Ikatan Alumni STAR BPKP se-Indonesia.
11. Keluarga Besar Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.

Sebagai penutup Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, namun sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 24 Januari 2017
Penulis,

Ardi Irphani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO DAN PESEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan Penelitian	8
	1.3 Identifikasi Penelitian	9
	1.3.1 Pertanyaan Penelitian	9
	1.3.2 Batasan Masalah	9
	1.4 Kontribusi Penelitian	10
BAB II	KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN	
	HIPOTESIS	11
	2.1 Kerangka Teori	11
	2.1.1 Teori tentang <i>Fraud</i>	11
	2.1.2 Tekanan	21
	2.1.3 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal	22
	2.1.4 Perilaku Tidak Etis	25
	2.1.5 Jabatan dalam Pengelola Keuangan	26

2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	29
2.3.1 Tekanan berpengaruh terhadap <i>Fraud</i>	29
2.3.2 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap <i>Fraud</i>	30
2.3.3 Perilaku Tidak Etis terhadap <i>Fraud</i>	32
2.3.4 Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap <i>Fraud</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Populasi dan Sampel.....	34
3.1.1 Populasi Penelitian	34
3.1.2 Sampel Penelitian	34
3.2 Operasional Variabel Penelitian	36
3.2.1 Variabel Dependen.....	36
3.2.2 Variabel Independen	37
3.3 Metoda Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Analisis.....	45
3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator	45
3.4.2 Pengukuran Model	46
3.4.3 Uji Hipotesis.....	50
3.5 Model Penelitian.....	50
3.6 Analisis Tambahan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Analisis Deskriptif.....	53
4.1.1 Demografi Responden.....	53
4.2 Deskriptif Variabel Penelitian	56
4.3 Uji Instrumen Penelitian	62
4.4 Uji Kecocokan Model (<i>Goodnes of Fit</i>)	65
4.5 Uji Hipotesis	68
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	72

4.6.1 Pengaruh Tekanan terhadap <i>Fraud</i>	72
4.6.2 Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap <i>Fraud</i>	73
4.6.3 Pengaruh Perilaku tidak Etis terhadap <i>Fraud</i>	74
4.6.4 Pengaruh Jabatan dalam pengelola Keuangan terhadap <i>Fraud</i>	75
4.7 Analisis Tambahan	76
4.7.1 Pengaruh Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap <i>Fraud</i> dengan Tekanan sebagai Moderating	76
4.7.2 Pengaruh Perilaku tidak Etis terhadap <i>Fraud</i> dengan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal sebagai Moderating	78
4.8 Pembahasan Hasil Analisis Tambahan.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Implikasi dan Saran	85
5.3 Keterbatasan Penelitian	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
2.1 <i>Fraud Diamond Theory</i>	15
3.1 Kerangka Pemikiran.....	51
3.2 Model I	52
3.3 Model II.....	52
4.1 Model Hasil Penelitian.....	69
4.2 Pengaruh Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap <i>Fraud</i> dimoderasi oleh Tekanan.....	77
4.3 Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap <i>Fraud</i> dimoderasi oleh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal	80

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 Daftar Kasus <i>Fraud</i> /Korupsi di Kota Metro	2
1.2 LHP pada LKPD Kota Metro T.A 2013-2015	4
2.1 Klasifikasi Motif/Tekanan	21
2.2 Penelitian Terdahulu	27
3.1 Data SKPD yang ada di Kota Metro	35
3.2 Penjelasan Indikator Variabel <i>Fraud</i>	37
3.3 Penjelasan Indikator Variabel Tekanan	38
3.4 Penjelasan Indikator Variabel Keefektifan SPI	39
3.5 Penjelasan Indikator Variabel Perilaku Tidak Etis	40
3.6 Definisi Sasaran Pengukuran Variabel	41
3.7 Penjelasan Indikator Variabel Jabatan dalam Pengelola Keuangan	42
3.8 Definisi Operasional Variabel	43
3.9 <i>Goodnes of Fit Index</i>	50
4.1 Distribusi Kuesioner	53
4.2 Data Responden	54
4.3 Hasil Statistik Variabel Tekanan	57
4.4 Hasil Statistik Variabel Keefektifan SPI	58
4.4 Hasil Statistik Variabel Perilaku Tidak Etis	59
4.6 Hasil Statistik Variabel Jabatan dalam Pengelola Keuangan	60
4.7 Hasil Statistik Variabel <i>Fraud</i>	61
4.8 Hasil Uji Validitas	62
4.9 Hasil Uji Reliabilitas	64
4.10 <i>Goodnes of Fit Index</i>	65
4.11 Hasil Pengujian Hipotesis	68
4.12 Hasil Estimasi	78
4.13 Hasil Estimasi	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara disebut sebagai tindakan korupsi.

Tindakan korupsi pada pemerintahan yang menjadi bagian dari *fraud* dalam akuntansi, merupakan tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya keuangan demi memberi keuntungan pribadi dan kelompok. *Fraud* merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Hall (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan

atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut.

Instansi pemerintah sebagai pelaksana program dan kegiatan kerakyatan, terindikasi secara nyata adalah pelaku *fraud*. Hal itu terjadi dikarenakan aparatur pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan *fraud*. Pemerintah Kota Metro sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di Kota Metro, tidak luput dari adanya tindakan *fraud*.

Beberapa kasus *fraud* yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang terpublikasi di media, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 yakni kasus *fraud*/korupsi yang terjadi di Kota Metro.

Tabel 1.1
Daftar kasus *fraud*/korupsi di Kota Metro

No.	Keterangan
1.	Kasus korupsi alat berat pengangkut sampah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (www.kejarimetro.blogspot.co.id)
2.	Kasus korupsi pembangunan gedung Pasar Tejoagung di Kota Metro sebesar Rp. 3,5 miliar dengan kerugian negara Rp. 265 juta yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (www.infokorupsi.com dikutip tanggal 14 April 2016)
3.	Kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013 dan 2014 yang dilakukan Kepala SMAN 4 Kota Metro (www.detiklampung.com)
4.	Kasus korupsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 320 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rehab sekolah dan alat olahraga SDN 6 Metro Utara (www.lampung7news.com)

Sumber: Data diolah, 2016

Kecenderungan *fraud* dapat diidentifikasi melalui elemen-elemen dalam *Fraud Diamond Theory* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud Diamond Theory* menyebutkan 4 elemen penyebab *fraud* yaitu: *incentive/pressure, opportunity, rationalization, capability*.

Incentive/pressure diasumsikan pada adanya tekanan yang mendorong seseorang untuk bertindak curang (Wolfe dan Hermanson, 2004). Pada sebuah organisasi pemerintah, tekanan itu muncul dari berbagai hal diantaranya tekanan akan kebutuhan yang tidak tercukupi dari adanya kompensasi yang diberikan.

Tekanan dari lingkungan kantor, seperti pimpinan kepada bawahan atau kepada pejabat dengan level dibawahnya untuk melakukan kecurangan akuntansi guna kenaikan karier, mempertahankan posisi jabatan, memuluskan proyek, dll.

Tekanan yang terakhir adalah tekanan dari luar organisasi yang ikut mempengaruhi seorang pegawai bertindak *fraud*.

Opportunity diasumsikan pada kesempatan yang dimiliki oleh pegawai karena adanya kelemahan dalam sistem, dimana seseorang yang tepat bisa mengeksploitasi sebuah penipuan (Wolfe dan Hermanson 2004). Keefektifan sistem pengendalian internal pada pemerintah Kota Metro sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dinilai masih kurang efektif. Dari LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk Kota Metro masih banyak temuan pada Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hal itu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada LKPD Kota Metro TA. 2013-2015
oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No	Tahun	Kriteria	Temuan	Rekomendasi	Nilai	Tindak Lanjut	Nilai	Ket.
1.	2013	SPI	5	13	-	13	-	-
		Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	5	13	963.299.553,22	11	838.106.291,82	-
2.	2014	SPI	8	21	-	17	-	-
		Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	4	13	756.692.914,74	11	60.687.997,9	-
3.	2015	SPI	8	23	-	-	-	Tindak lanjut sudah dikirim ke BPK Prov. Lampung
		Kepatuhan terhadap Perundang-undangan	6	15	1.438.874.251,80	-	12.230.000	Tindak lanjut sudah dikirim ke BPK Prov. Lampung
Total			36	98	3.158.866.719,76	52	911.024.289,72	

Sumber: Inspektorat Kota Metro, 2016

Rationalization diasumsikan pada kesadaran seseorang bahwa perilaku *fraud* ini bernilai risiko (Wolfe dan Hermanson 2004). Hal ini dimaknai dengan persepsi pegawai tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi seluruh pegawai yang berada didalam instansi. Robinson (1995) Tang dan Chiu (2003) menyebutkan beberapa penelitian tentang *rationalization* diukur berdasarkan beberapa indikator yaitu: perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (*abuse position*), perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), dan perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Capability diasumsikan sebagai kemampuan yang diperlukan dan dimiliki seseorang untuk melakukan *fraud* (Wolfe dan Hermanson 2004). Wolfe dan Hermanson (2004) menunjukkan bahwa pelaku kecurangan sebagian besar adalah orang dalam, dimana *fraud* akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Kapasitas atau kemampuan seorang pegawai untuk melakukan *fraud* adalah pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah, karena dengan jabatan yang dimilikinya dapat memberi keleluasaan/kewenangan lebih untuk melakukan penyimpangan pengelolaan anggaran. Pejabat-pejabat dimaksud diantaranya adalah:

1. Pengguna Anggaran (PA): Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): sebagai pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran: memiliki kewajiban untuk melakukan dan melaksanakan serta melaporkan pertanggung

jawaban belanja barang/jasa pemerintah.

Sumber: Perpres No. 54 Tahun 2010

Guna mempertajam pandangan tentang fenomena *fraud* pada pemerintahan yang ada di Indonesia, beberapa peneliti memberikan pendapat yang berbeda. Pada SNA XIX Lampung Tahun 2016 yang dilaksanakan di Universitas Lampung, Pratomo, Pramuka, dan Maghfiroh (2016) menyampaikan penelitiannya tentang analisis *fraud diamond* terhadap kecenderungan perilaku *fraud* pada pengelola keuangan pemerintah. Hasilnya keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis, semuanya berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Sedangkan kompetensi berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Pada acara yang sama, Mustika, Hastuti, dan Heriningsih (2016) mengemukakan hasil yang sedikit berbeda. Penelitian yang dilakukan pada Dinas di Pemerintah Daerah Way Kanan menghasilkan kesimpulan yaitu asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Randa dan Meilina (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas manajemen terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Hasilnya adalah keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen berpengaruh negatif, asimetri informasi berpengaruh positif, sedangkan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian serupa dilakukan oleh Najahningrum (2013) pada Dinas yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedur, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Zulkarnain (2013) melakukan penelitian pada Dinas di Kota Surakarta menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan gaya kepemimpinan dengan *fraud* di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud*. Sementara menurut Mustikasari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) menyatakan bahwa kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini bertentangan antara hipotesis serta teori dan hasil penelitian sebelumnya. Wilopo (2006) juga membuktikan dan mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan cara meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen serta menghilangkan asimetri informasi.

Dari beberapa fenomena yang muncul atas tindakan korupsi (*fraud*) di Kota Metro, masih adanya gap penelitian dan perbedaan lokasi penelitian pada penelitian terdahulu, serta penggunaan variabel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang *fraud* yang berjudul **“Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis, dan Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap *Fraud* (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Metro).”**

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris pengaruh dari tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan terhadap *fraud* pada SKPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Metro. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengakomodir saran dari penelitian Gbegi dan Adebisi (2013) agar mengembangkan teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) menjadi *New Fraud Diamond Model*. Untuk itu penelitian ini menguji hubungan moderasi antara jabatan dalam pengelola

keuangan terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh tekanan, dan perilaku tidak etis terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh keefektifan sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Kota Metro.

1.3 Identifikasi Penelitian

1.3.1 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud*?
- b. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat *fraud*?
- c. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap tingkat *fraud*?
- d. Apakah jabatan dalam pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat *fraud*?

1.3.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hanya menguji hubungan empiris dari tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan terhadap *fraud* di SKPD yang ada pada Pemerintah Daerah Kota Metro. Selain itu penelitian ini juga menguji pengaruh antara jabatan dalam pengelola keuangan terhadap *fraud* dengan tekanan sebagai moderasi, dan pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap *fraud* dengan keefektifan sistem pengendalian internal sebagai moderasi.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah:

- a. Aspek teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam hal menambah literatur yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi, dimana 2 (dua) variabel yang digunakan dalam penelitian ini (variabel tekanan dan variabel jabatan dalam pengelola keuangan) merupakan hal baru dalam penelitian yang berkaitan dengan *fraud*. Penelitian ini memberikan tambahan fenomena tentang pengaruh tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan apakah menjadi faktor adanya kecenderungan *fraud* pada Pemerintah Daerah Kota Metro. Penelitian ini juga memberikan wawasan tambahan tentang pengaruh variabel jabatan dalam pengelola keuangan terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh variabel tekanan dan pengaruh variabel perilaku tidak etis terhadap *fraud* yang dimoderasi oleh keefektifan sistem pengendalian internal, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Aspek praktis yaitu menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Metro dalam mengkaji apakah tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan menjadi faktor pemicu *fraud*, sehingga dapat menyusun langkah-langkah yang aktual dalam mengurangi tingkat *fraud* di Kota Metro.

BAB 2

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori tentang *Fraud*

Fraud merupakan istilah yang umum dikalangan para akuntan, auditor, investor, dan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi akuntansi. *Fraud* sendiri memiliki cakupan pengertian yang cukup luas. Istilah *fraud* diartikan sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Hall (2007) mendefinisikan *fraud* sebagai kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. *Fraud* menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja.

Dari beberapa definisi *fraud* diatas dapat diketahui bahwa *fraud* merupakan suatu kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dan dilakukan dengan

melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri. Hal ini yang membedakan antara kecurangan dengan kesalahan.

Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana, antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta dan juga termasuk korupsi. *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)*, salah satu asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut :

1. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation adalah penyalahgunaan/pencurian/pengambilan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Jenis-jenis penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) antara lain *larceny, billing schemes, payroll schemes, expense reimbursement schemes, check tampering, dan register disbursements*.

3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis kecurangan ini banyak terjadi di sektor pemerintahan. Kecurangan dalam bentuk korupsi ini sulit untuk dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang

yang berkerjasama dalam melakukan kecurangan tersebut. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

a. *The Fraud Triangle Theory*

Konsep *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1953). *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *rationalization*, *pressure*, dan *opportunity*. *Fraud triangle* biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan. *Rationalization* merupakan kecurangan yang dilakukan karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang. Rasionalisasi dilakukan melalui keputusan yang dibuat secara sadar dimana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain. *Pressure* berawal dari adanya tekanan yang terjadi dari dalam organisasi maupun kehidupan individu. Kebutuhan individu secara personal dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi. Alasan untuk melakukan kecurangan seringkali dipicu melalui tekanan yang mempengaruhi individu, rasionalisasi, atau kesempatan. *Opportunity* akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan. Satu-satunya faktor penyebab kecurangan yang dapat dikendalikan adalah *opportunity*. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Kemungkinan melakukan

kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan. Perangkat yang dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang memadai. Pelaku kecurangan dapat dikategorikan menjadi empat kelompok (Vona, 2008):

1. *First-time offenders*

Merupakan tipe pelaku tanpa latar belakang kriminal. Pelaku memiliki tekanan dalam kehidupannya untuk melewati batas kapasitas penghasilannya atau pelaku merasionalisasi perilakunya adalah hal biasa jika melakukan penggelapan. Jika faktor tekanan dan rasionalisasi melampaui faktor takut untuk terdeteksi, maka seseorang akan mencari kelemahan pengendalian internal atau kesempatan untuk melakukan kecurangan.

2. *Repeat offenders*

Hasil statistik menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan internal memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Dalam hal ini, faktor tekanan dan rasionalisasi akan kurang dominan dibandingkan dengan tipe *first-time offender*. Faktor kesempatan akan menjadi pemicu untuk melakukan kecurangan.

3. *Organized crime groups*

Kelompok kecurangan tipe ini termasuk kelompok profesional, bisa juga secara individu, yang biasanya melakukan kecurangan dengan tipe khusus. Faktor utama kecurangan tipe ini bisa terlaksana karena adanya kesempatan, yaitu lemahnya

pengendalian internal, penyuapan atau pemerasan oleh karyawan, atau melalui kolusi dengan pemasok atau pelanggan.

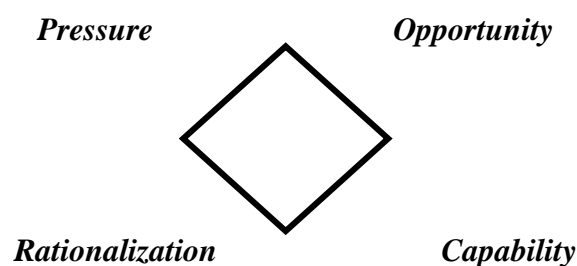
4. *Internally committed for the perceived benefit of the corporation*

Pelaku kecurangan biasanya pegawai yang percaya bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan adalah untuk kebaikan perusahaan. Secara khusus, dominasi faktor tekanan dan rasionalisasi terhadap kesempatan kondisinya sama seperti tipe *first-time offender* maupun *repeat offender*.

b. Fraud Diamond Theory

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni *capability*.

Gambar 2.1



Fraud Diamond Theory oleh Wolfe dan Hermanson (2004)

Secara keseluruhan *Fraud Diamond* merupakan penyempurnaan dari *Fraud Model* yang dikemukakan Cressey (1953). Adapun elemen-elemen dari *Fraud diamond theory* antara lain :

1. *Incentive/Pressure*: adanya tekanan untuk melakukan *fraud*
2. *Opportunity*: adanya kelemahan dalam sistem, dimana seseorang yang tepat dapat mengeksploitasi sebuah *fraud*
3. *Rationalization*: adanya keyakinan pada diri seseorang bahwa perilaku penipuan ini bernilai risiko
4. *Capability*: adanya kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat dalam melakukan *fraud*

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah *fraud* yaitu dengan cara menambahkan elemen keempat yakni *capability*. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa:

“Many Frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunity opens the doorway to Fraud, and incentive and Rationalization can draw the person toward it. But the person must have the Capability to recognize the open doorway as an Opportunity and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and time again. Accordingly, the critical question is; Who could turn an Opportunity for Fraud into reality?”

Artinya adalah banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *fraud*, *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

Namun menurut Wolfe dan Hermanson (2004), orang yang melakukan *fraud* tersebut harus memiliki kapabilitas untuk menyadari pintu yang terbuka sebagai peluang emas dan untuk memanfaatkannya bukan hanya sekali namun berkali-kali. Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan *fraud* atau menyebabkan penyelidikan oleh internal auditor seperti yang dikemukakan dalam jurnal penelitiannya:

“When designing detection systems, it is important to consider who within the organization has the Capability to quash a red flag, or to cause a potential inquiry by internal auditors to be redirected. A key to mitigating Fraud is to focus particular attention on situations offering, in addition to incentive and Rationalization the combination of Opportunity and Capability.”

Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam memitigasi *fraud* adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi selain *pressure* dan *rationalization* serta kombinasi dari *opportunity* dan *capability*.

c. *Fraud* di Sektor Pemerintahan

Fraud yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara luas definisi korupsi dijelaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dirumuskan kedalam bentuk atau jenis diantaranya:

1. Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.
2. Suap-menyuap
 - a. Menyuar pegawai negeri.
 - b. Memberikan hadiah kepada pegawai karena jabatannya.
 - c. Pegawai negeri menerima suap.
 - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.
 - e. Menyuar hakim.
 - f. Menyuar advokat.
 - g. Hakim dan advokat menerima suap.
 - h. Hakim menerima suap.
 - i. Advokat menerima suap.

3. Penggelapan dalam Jabatan
 - a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
 - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
 - c. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti.
 - d. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti.
4. Pemerasan
 - a. Pegawai negeri memeras.
 - b. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.
5. Perbuatan Curang
 - a. Pemborong berbuat curang.
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
 - c. Rekanan TNI atau POLRI berbuat curang.
 - d. Pengawas rekanan TNI atau POLRI membiarkan perbuatan curang.
 - e. Penerima barang TNI atau POLRI membiarkan perbuatan curang.
 - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
 - a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
7. Gratifikasi
 - a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK

Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan

pemerintah daerah. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

d. Indikator Pengukuran *Fraud*

Wilopo (2006) mengemukakan bahwa upaya menghilangkan tindak kecurangan/*fraud* anggaran dapat dilakukan antara lain dengan :

- a. Mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan hukum.
- b. Perbaiki sistem pengawasan dan pengendalian.
- c. Pelaksanaan *good governance*.
- d. Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara, dan masyarakat.

Sedangkan indikator pengukuran *fraud* yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) dari SPAP 316 IAI (2001) yang dimodifikasi. Indikator tersebut terdiri dari: manipulasi, pemalsuan dokumen, penghilangan informasi, penggelapan aktiva, dan pelanggaran terhadap prinsip akuntansi.

2.1.2 Tekanan

Adanya tekanan baik dari internal maupun eksternal suatu organisasi dapat membuat seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat berasal dari berbagai macam aspek, seperti *personal pressure*, *employment pressure*, *external pressure* (Lister, 2007). Vona (2008) meyakini motif untuk melakukan *fraud* sering dikaitkan dengan tekanan pribadi atau tekanan organisasi. Murdock (2008) juga berpendapat bahwa tekanan terbagi menjadi *financial pressure*, *non financial pressure*, dan *political and social pressure*. Tekanan *non financial* dapat berasal dari kurangnya disiplin pribadi atau kelemahan lainnya seperti perjudian, dan kecanduan narkoba (Murdock, 2008). Namun Rae dan Subramaniam (2008) mengatakan bahwa tekanan berkaitan dengan motivasi pegawai untuk melakukan penipuan sebagai akibat dari keserakahan atau tentang keuangan pribadi. Dengan demikian tekanan untuk melakukan *fraud* dapat berupa *personal pressure*, *employment pressure*, *external pressure* dan masing-masing jenis tekanan juga bisa terjadi karena *financial pressure* dan *non financial pressure* (Rasha dan Andrew, 2012).

Tabel 2.1
Klasifikasi Motif/Tekanan

<i>Personal pressure</i>	<p><i>Financial pressure</i>: Perjudian, kecanduan narkoba, permasalahan keuangan tiba-tiba, membiayai gaya hidup.</p> <p><i>Non financial pressure</i>: Kurangnya disiplin pribadi, keserakahan.</p>
<i>Employment pressure</i>	<i>Financial pressure</i> : keberlanjutan struktur kompensasi, kepentingan keuangan pimpinan, gaji rendah.

	<i>Non financial pressure</i> : Perlakuan tidak adil, takut kehilangan pekerjaan, frustrasi dengan pekerjaan, atau tantangan untuk menanggung resiko.
<i>External pressure</i>	<p><i>Financial pressure</i>: Ancaman terhadap stabilitas keuangan, ekspektasi pasar (memenuhi tuntutan masyarakat).</p> <p><i>Non financial pressure</i>: Ego, citra atau reputasi, tekanan sosial.</p>

Sumber: Rasha dan Andrew (2012)

Fraud yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar muncul dari keinginan pimpinan untuk memanipulasi, *mark up*, maupun penggelapan anggaran pemerintah. Tuntutan tersebut muncul dari keserakahan (Bologne, 2006), kebutuhan (Lister, 2007), dan pencitraan. Ungkapan yang umumnya dipakai adalah “setoran ke bos” (KPK, 2008), hal ini dilakukan oleh bawahan kepada pimpinan atau jabatan yang lebih rendah kepada jabatan di atasnya guna memperoleh manfaat dari kewenangan yang dimiliki seorang pimpinan. Banyak studi menunjukkan *fraud* lebih mungkin terjadi ketika seseorang memiliki *incentive/pressure* (tekanan) untuk melakukan penipuan (Wolf dan Hermanson, 2004). Tekanan yang datang dari berbagai aspek tentu mempunyai alasan, dan hal itu dapat diukur berdasarkan klasifikasi tekanan: *personal pressure*, *employment pressure*, *external pressure* (Lister, 2007).

2.1.3 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian dari sistem proteksi terhadap kecurangan yang di desain untuk mencegah irregularitas dan upaya deteksi dini kecurangan (Silverstone, 2007). Prinsip umum pengendalian internal, berpola pada sistem

yang menjalankan prosedur-prosedur tanggung jawab pada sebuah institusi. Suatu sistem pengendalian internal yang kuat dapat disusun apabila institusi tersebut sudah cukup besar. Pengendalian internal pada sebuah institusi dimana kecurangan tidak hanya dapat dilakukan bawahan, tetapi dilakukan oleh seorang atasan/pimpinan, perlu dilakukan oleh beberapa/banyak orang.

Untuk permasalahan yang demikian dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi untuk saling mengawasi dan mengawasi pihak lain, baik di tingkat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Dengan adanya konsekuensi tersebut akan membawa pengaruh yang lebih kuat dari adanya pengawasan internal. Banyak studi menyimpulkan pengendalian yang dilakukan secara bersama-sama membawa dampak yang signifikan terhadap hasil yang hendak dicapai.

Menurut Arens (2003) suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan proses yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Krismadji (2002) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk melindungi kebijakan manajemen.

Menurut COSO (*Comitee of Sponsoring Organization*), pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait yaitu:

1. Lingkungan pengendalian (*control environtment*) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian

mencakup: (1)Integritas dan nilai etika, (2) Komitmen terhadap kompetensi, (3) Partisipasi dewan komisaris atau komite audit, (4) Filosofi dan gaya operasi manajemen, (5) Struktur organisasi, (6) Pemberian wewenang dan tanggung jawab, (7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran risiko (*risk assesment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut: (1) Perubahan dalam lingkungan organisasi, (2) Personel baru, (3) Sistem informasi yang baru atau diperbaiki, (4) Teknologi baru, (5) Lini produk, produk atau aktivitas baru, (6) Operasi luar negeri, (7) Standar akuntansi baru.
3. Standar Pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penelaahan terhadap kinerja, (2) Pengolahan informasi, (3) Pengendalian fisik, (4) Pemisahan tugas
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi

aktiva, utang dan ekuitas. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan.

5. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik tentu akan mempersempit atau mengurangi kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan *fraud*.

2.1.4 Perilaku Tidak Etis

Buckley *et al.*, (1998) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu pola tingkah laku yang salah, yang dilakukan secara sadar dan menjadi tradisi di suatu bagian organisasi. Kondisi di lapangan menyebutkan bahwa perilaku tidak etis merupakan asas perilaku menyimpang yang disepakati/dibenarkan maupun perilaku salah yang dilakukan secara terus menerus sehingga umum dilakukan.

Rae dan Subramaniam (2008) menunjukkan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, dan menghindari perbuatan kecurangan di dalam instansi, lingkungan etis ini dapat dinilai dengan adanya perilaku tidak etis organisasi dan komitmen organisasi, sehingga dapat dikatakan, jika instansi mempunyai perilaku tidak etis organisasi yang tinggi maka akan mendorong pegawai untuk melakukan tindakan *fraud*. Zulkarnain (2013) mengatakan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang

jawabannya bergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Sehingga disimpulkan bahwa perilaku tidak etis dalam *fraud* adalah tradisi atau cara yang dianggap benar oleh pelaku *fraud* karena dianggap umum atau hal yang wajar dilakukan. Dengan mengacu pada dimensi perilaku yang menyimpang dalam bekerja dari Robinson (1995), Tang dan Chiu (2003) dalam penelitiannya menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam perusahaan. Perilaku ini adalah terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

2.1.5 Jabatan dalam Pengelola Keuangan

Beasley (1996) mengatakan korupsi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi. Hal ini serupa dengan ungkapan klasik dari Acton (1834-1902) dalam Alatas (1987) “*Power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi). Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki seseorang tentunya akan memudahkan seseorang berbuat curang. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) kemampuan memainkan peran utama dalam sebuah penipuan, selain tiga elemen lainnya (*fraud triangle*).

Integrity merupakan salah satu penilaian pegawai setiap tahun yang tertuang dalam PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai). Rendahnya *integrity* dapat

memicu seseorang bertindak *fraud*. Dimana dengan kedudukan dan jabatan yang dimilikinya tersebut dapat mengoprasionalisasikan dan melaporkan keadaan/kondisi keuangan sesuai dengan yang diinginkan tanpa diketahui orang lain (KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi maupun Kab/Kota, dan masyarakat). Kemampuan tersebut tentunya dapat mendorong seorang pejabat melakukan *fraud*. Selain *integrity, abuse of authority, ability to make policy, and ability to give pressure* menjadi indikator dalam mengukur kecenderungan seorang pejabat pengelola keuangan melakukan *fraud* (Gbegi dan Adebisi, 2013, Wolfe dan Hermanson, 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pengembangan teori tentang pengaruh tekanan pimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan terhadap *fraud* pada sektor pemerintah perlu terus dilakukan. Hal itu guna mengurangi, bahkan menghilangkan tindak kecurangan/pelanggaran dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan akuntansi keuangan. Oleh karena itu penulis hendak meneliti dan menguji pengaruh tersebut pada SKPD di Kota Metro. Sebagai rujukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Erickson, Hanlon, Maydew (2006) <i>“Is There a Link Between Executive Equity Incentives and</i>	Variabel Independen: 1. <i>External Financing</i> 2. <i>Size</i> 3. <i>Compensation</i>	Perbandingan dengan <i>Univariate Test and Multivariate Test</i>	Kecurangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh <i>executive stock based compensation and executive pay for performance pay for</i>

<i>Accounting Fraud</i>	<p><i>System</i></p> <p>4. <i>Corporate Governance</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1. <i>Fraud</i></p>		<i>performer sensitifity.</i>
<p>Wilopo (2006)</p> <p>“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan BUMN di Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas pengendalian internal 2. Kesesuaian kompensasi 3. Ketaatan aturan akuntansi 4. Asimetri informasi 5. Moralitas manajemen <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku tidak etis 2. Kecenderungan kecurangan akuntansi 	<p>Analisis penelitian dilakukan dengan AMOS 4.0 (<i>Confirmatory factor analysis</i>)</p>	<p>Perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan efektifitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas serta menghilangkan asimetri informasi.</p>
<p>Coram, Ferguson, Moroney (2006)</p> <p>” <i>The Value of Internal Audit in Fraud Detection</i> ”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit</i> 2. <i>Corporate Governance Structure</i> <p>Variabel Dependen:</p> <p>1. <i>Fraud</i></p>	<p>Analisis menggunakan statistik deskriptif, uji <i>Chi-square</i>, dan analisis kovarians.</p>	<p>Organisasi yang memiliki fungsi pengendalian internal lebih mampu mendeteksi adanya kecurangan daripada organisasi yang tidak mempunyai</p>
<p>Rasha dan Andrew</p> <p>“<i>The New Fraud Trianggle Model</i>”</p>	<p>Variabel:</p> <p>1. <i>Fraud</i></p>	<p>Analisis penelitian terdahulu</p>	<p>Peneliti mengusulkan model baru teori <i>Fraud Triangle</i> (Cressey, 1953) yaitu mengembangkan unsur tekanan menjadi tekanan pribadi, pekerjaan dan eksternal. Serta memperluas lagi ketiga unsur tersebut menjadi tekanan keuangan dan non keuangan.</p>
<p>Gbegi dan Adebisi (2013)</p> <p>“<i>The New Fraud Diamond Model-How Can It Help Forensic Accountants In Fraud Investigation In Nigeria?</i>”</p>	<p>Variabel :</p> <p><i>Fraud, Fraud Diamond Model, Fraud Investigation, Forensic Accountants, Fraud Detection</i></p>	<p>Analisis penelitian terdahulu</p>	<p>Penulis mengadopsi sumber sekunder dari data (penelitian terdahulu) untuk menjelaskan Teori <i>Fraud Diamond</i> oleh Wolf dan Hermanson (2004) dengan menunjukkan relevansinya, menyajikan model penipuan lainnya, dan menghubungkannya serta</p>

			<p>mengusulkan Teori <i>New Fraud Diamond Model</i>. Teori ini diharapkan dapat digunakan oleh Akuntan Forensik ketika menilai risiko penipuan di Nigeria yaitu dengan mempertimbangkan motivasi, kesempatan, integritas pribadi, kemampuan dan tata kelola organisasi..</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah (2016)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Tekanan berpengaruh terhadap *Fraud*

Dandago (1997) menyatakan bahwa penipuan adalah keliruan informasi keuangan oleh satu atau lebih individu, antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga. Hal ini melibatkan penggunaan penipuan kriminal untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Kecurangan yang disengaja atau penipuan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Wells (2011) melihat kecurangan memiliki arti yang berbeda dari kesalahan, yang mengacu pada salah saji yang tidak disengaja atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan.

Permasalahan yang timbul sehingga seorang pegawai memutuskan untuk berperilaku curang (*fraud*) adalah adanya desakan baik dari diri pribadi, organisasi, maupun dari luar. Cressey (1953) membagi masalah keuangan kedalam enam kategori: kesulitan untuk pengembalian utang, masalah yang dihasilkan dari kegagalan pribadi, kegagalan bisnis seperti adanya inflasi atau resesi, isolasi fisik (pelanggar kepercayaan yang dipisahkan dari orang-orang yang dapat membantu dia), ego untuk hidup di luar kemampuan seseorang, dan

perlakuan tidak adil dari pimpinan. Adanya desakan-desakan tersebut, mendorong seorang pegawai melakukan upaya untuk mencukupi kebutuhan diluar kemampuannya (Albrecht, 2004). Upaya tersebut dapat berasal dari *pressure* (Wolfe dan Hermanson, 2004). *Pressure* atau tekanan umumnya diukur dari beberapa hal diantaranya: *personal pressure, employment pressure, external pressure* (dikembangkan oleh Rasha dan Andrew, 2012).

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Adanya tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud*.

2.3.2 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

Dari pernyataan yang dikemukakan Arens (2006:370) bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu: reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi, efektivitas operasional, dan ketaatan pada hukum dan aturan. Dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal yang tidak efektif akan membuat seseorang memiliki kesempatan dan lebih mudah untuk melakukan *fraud* yang akan merugikan organisasi dan mengganggu keberlangsungan organisasi, sehingga tujuan dari organisasi tidak tercapai. Hal ini didukung oleh Bologne (1993) dalam *GONE theory* yaitu teori yang mengemukakan empat faktor yang menyebabkan dan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu *Greed* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Need* (Keinginan) dan *Exposure* (pengungkpan), menyatakan faktor yang sangat mendukung terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi yaitu adanya *opportunity* (kesempatan).

Mathis dan Jackson (2006), menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Dengan adanya pengawasan yang terdapat dalam sebuah sistem pengendalian internal tentunya membuat para dalang (pelaku, *red*) akan merasa diawasi dan membuat pilihan untuk menghindar.

Pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi (Arens *et al*, 2000). Sejalan dengan pernyataan tersebut penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecederungan kecurangan akuntansi. Dari beberapa pendapat penelitian sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa kecurangan akuntansi umumnya dilakukan karena adanya kesempatan dan peluang yang muncul akibat lemahnya pengendalian internal dalam sebuah organisasi.

Sistem pengendalian internal yang lemah dalam sistem birokrasi pemerintahan, dapat menjadi peluang bagi pejabat maupun staf pada instansi pemerintah, hal itu karena tindakan yang dilakukan tidak terdeteksi oleh siapapun. Sebaliknya, jika semakin baik sistem pengendalian internal dalam sistem birokrasi pemerintah, maka tindakan *fraud* akan sulit dilakukan, karena setiap kegiatan yang dilakukan telah dibatasi dan diawasi oleh tata kelola sistem pengendalian internal. Jadi, semakin efektif tingkat pengendalian internal dalam suatu sistem birokrasi

pemerintah, maka akan semakin kecil pula kesempatan bagi pegawai untuk melakukan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis:

H2: Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

2.3.3 Perilaku Tidak Etis terhadap *Fraud*

Salah satu faktor yang mempengaruhi *fraud* di sektor pemerintahan adalah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis sebagaimana diungkapkan oleh Tang dan Chiu (2003) dalam penelitiannya menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Hasil penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan. Perilaku tidak etis merupakan kebiasaan yang menjadi peninggalan dari masa lalu, dalam hal ini kebiasaan melakukan *fraud*, merasa atau menganggap melakukan *fraud* merupakan hal yang etis dan didasari dengan perilaku tidak etis maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perilaku tidak etis (menganggap *fraud* adalah hal benar), maka semakin tinggi perilaku *fraud* dalam organisasi tersebut. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* dengan kata lain bahwa perilaku tidak etis yang rendah maka *fraud* di sektor pemerintah pun juga rendah, sesuai dengan pernyataan Zulkarnain (2013)

menganggap perilaku tidak etis dipengaruhi dengan budaya organisasi sehingga perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*. Kondisi *fraud* berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat di turunkan menjadi hipotesis:

H3: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*.

2.3.4 Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap *Fraud*

Wolfe dan Hermanson (2004) menunjukkan bahwa pelaku kecurangan sebagian besar adalah orang dalam, dimana *fraud* akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Kapasitas atau kemampuan seorang pegawai untuk melakukan *fraud* adalah pejabat/petugas dibagian keuangan yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana posisi tersebut memungkinkan untuk dilakukan pelaporan fiktif, pengadaan barang/jasa tidak sesuai spesifikasi yang berlaku, perjalanan dinas fiktif dan banyak kecurangan di bidang akuntansi keuangan pemerintah (*fraud*). Sejalan dengan hal tersebut, pejabat pengelola keuangan yang tidak berintegritas memberikan pengaruh terhadap tingkat *fraud* (Gbegi dan Adebisi, 2013). Selan itu *abuse of authority*, *ability to make policy*, dan *ability to give pressure* juga ikut berpengaruh dan mempermudah pejabat pengelola keuangan dalam memanipulasi mata anggaran yang terdapat pada program dan kegiatan pemerintah (dikembangkan dari *fraud diamond theory* oleh Wolfe dan Hermanson, 2004).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di turunkan menjadi hipotesis:

H4: Jabatan dalam pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, populasi merupakan sumber data utama guna menyempurnakan dan pencapaian tujuan sebuah penelitian. Pada penelitian ilmiah selalu dihadapkan pada masalah populasi dan sampel, untuk itu dengan pemilihan populasi dan sampel secara tepat, maka dapat memudahkan pencapaian tujuan dalam penelitian.

Populasi juga diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2003).

Populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Metro. Populasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena diantara pegawai/pejabat pada Pemerintah Daerah Kota Metro terbukti terlibat kasus *fraud*/korupsi.

3.1.2 Sampel Penelitian

Penyempurnaan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan sampel yang tepat. Gay and Diehl (1996) mengutarakan untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan menggunakan regresi/korelasional, minimal diambil 30 sampel. Dalam pengambilan sampel tentunya perlu menggunakan beberapa metode.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria pegawai yang mempunyai pengaruh dalam melakukan *fraud*, yaitu pemegang jabatan pengelola keuangan (pejabat pengadaan barang/jasa) diantaranya: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran. Jumlah SKPD di Kota Metro yang termasuk dalam penelitian yaitu berjumlah 34 SKPD (dengan asumsi jumlah responden per SKPD berjumlah 10 responden, dengan total 340 responden).

Tabel 3.1
Data SKPD yang ada di Kota Metro

No.	SKPD
	Sekretariat Daerah
1	Bagian Umum
2	Bagian Protokol
3	Bagian Adm Pemerintahan
4	Bagian Adm Pembangunan
5	Bagian Adm Perekonomian
6	Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat
7	Bagian Hukum
8	Bagian TU Keuangan
9	Bagian Organisasi
10	Sekretariat DPRD
11	Inspektorat
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Badan Kepegawaian Daerah
14	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16	RSUD Jenderal Ahmad Yani
17	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
19	Kantor Lingkungan Hidup
20	Kantor Ketahanan Pangan
21	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

23	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
26	Dinas Kesehatan
27	Dinas Tata Kota dan Pariwisata
28	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
29	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat
30	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
31	Dinas Pendapatan
32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
33	Dinas Perdagangan dan Pasar
34	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kota Metro (2016)*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan metode survey, yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para pemegang jabatan pengelola keuangan (pejabat pengadaan barang/jasa) di setiap SKPD yang berjumlah 10 set kuesioner, sehingga jumlah kuesioner untuk 34 SKPD yang ada di Kota Metro berjumlah 340 kuesioner. Skala pengukuran kuesioner menggunakan 5 skala likert, dimana jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.2 Operasional Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *fraud*, dimana variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi dan mengalami perubahan dikarenakan adanya variabel independen. Guna mengukur variabel dependen, diperlukan indikator-indikator sebagai alat uji pada penelitian.

Mengacu pada penelitian Wilopo (2006) indikator yang digunakan adalah:

manipulasi, pemalsuan dokumen, penghilangan informasi, penggelapan aktiva, dan pelanggaran terhadap prinsip akuntansi.

Tabel 3.2
Penjelasan Indikator Variabel *Fraud*

No	Pernyataan	Keterangan
1	Suatu SKPD pada Kota X melaksanakan banyak kegiatan rutin. Dana yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan melebihi dari yang dibutuhkan dan dilaksanakan. Untuk menghindari adanya temuan, pimpinan meminta agar SPJ dibuat sebisa mungkin sesuai anggaran.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator manipulasi, dimana kata-kata “meminta agar SPJ dibuat sebisa mungkin sesuai anggaran” menunjukkan adanya manipulasi antara kondisi sebenarnya dengan laporan yang dibuat.
2	Di suatu SKPD Kota X, seorang Kepala Bidang memberikan bukti kuitansi atas belanja yang tidak dilakukannya, hal itu dilakukannya untuk menutupi biaya non teknis.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator pemalsuan dokumen. Dimana kata-kata “bukti kuitansi atas belanja yang tidak dilakukannya” merupakan adanya tindakan pemalsuan dokumen.
3	Di suatu SKPD Kota X, seringkali penyedia barang/jasa memberikan potongan dari penjualannya (<i>discount</i>) tanpa diminta. Nominalnya tidak besar. Atas instruksi pimpinan, bendahara mengumpulkan dan menyimpan hasil <i>discount</i> tersebut.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator penghilangan informasi. Dimana informasi tentang adanya <i>discount</i> dihilangkan, sehingga memberi keuntungan bagi sekelompok orang dan merugikan negara.
4	Pada suatu Kantor di Kota X, aset kantor seperti laptop lebih baik dinyatakan hilang/rusak parah untuk memudahkan pencatatan aset kantor.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator penggelapan aktiva, dimana aset kantor dengan sengaja dinyatakan hilang/rusak sehingga menambah beban bagi kantor untuk menggantinya, hal itu menjadi indikasi adanya <i>fraud</i> .
5	Pada suatu Kantor di Kota X, pelaksana/ penanggung-jawab kegiatan mempertimbangkan untuk melaporkan laporan keuangan yang melebihi penggunaan anggaran sehingga realisasi anggaran dapat terserap 100%, hal tersebut dilakukan agar jumlah anggaran di Tahun Anggaran berikutnya dapat ditambah.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator pelanggaran terhadap prinsip akuntansi. Guna menambah jumlah anggaran untuk tahun berikutnya, bendahara melaporkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, hal itu menyatakan bahwa laporan keuangan tidak relevan dan reliabel atau melanggar prinsip akuntansi.

Sumber: Data diolah

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan.

a. Tekanan

Variabel ini dikembangkan dari Teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) yaitu *Incentive/Pressure*. Tekanan merupakan variabel yang digunakan sebagai variabel yang mewakili salah satu dimensi dari Teori *Fraud Diamond* yaitu *Incentive/Pressure*. Indikator yang digunakan sebagai dasar instrumen pertanyaan dalam kuisisioner, diadopsi dan dikembangkan dari penelitian Rasha dan Andrew (2012) diantaranya: *personal pressure*, *employment pressure*, *external pressure*. Ketiga indikator tersebut dikembangkan kembali pada masing-masing indikator menjadi sub indikator yaitu *financial* dan *non financial* (Rasha dan Andrew, 2012). Guna mengakomodir indikator-indikator tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner, penulis melakukan observasi dan diskusi langsung kepada beberapa pegawai yang setingkat dengan responden diluar sampel penelitian guna memproyeksikannya menjadi pertanyaan yang mewakili indikator yang ada.

Tabel 3.3
Penjelasan Indikator Variabel Tekanan

No.	Pernyataan	Keterangan
1	Kompensasi berupa gaji, tunjangan, insentif maupun honor kegiatan saya belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>personal pressure</i> , dengan pertanyaan ini dapat dilihat adanya kemungkinan <i>fraud</i> pada saat kebutuhan tidak lagi tercukupi oleh kompensasi yang didapat.
2	Saya membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup saya.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>personal pressure</i> , dengan pertanyaan ini dapat dilihat adanya kemungkinan <i>fraud</i> pada saat seorang pegawai memiliki gaya hidup yang mewah.
3	Struktur kompensasi yang ada di kantor saya, belum adil dan merata.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>employment pressure</i> , dengan pertanyaan ini dapat dilihat adanya kemungkinan <i>fraud</i> pada saat seorang pegawai merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberian kompensasi diantara pegawai.
4	Saya sudah cukup nyaman dengan posisi jabatan saya saat ini di kantor.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>employment pressure</i> , dengan pertanyaan ini dapat dilihat adanya kemungkinan <i>fraud</i> pada saat jabatan yang

		merupakan beban diartikan sebagai kenyamanan.
5	Dalam pergaulan di masyarakat, saya ingin dihormati.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>external pressur</i> , dengan pertanyaan ini dapat dilihat adanya kemungkinan <i>fraud</i> pada saat seorang pegawai harus tampil diatas rata-rata agar dihormati dimasyarakat.
6	Saya membutuhkan kendaraan yang sesuai dengan jabatan saya di kantor.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>external pressure</i> , dengan pertanyaan ini dapat dilihat adanya kemungkinan <i>fraud</i> pada saat kebutuhan/keinginan melampaui penghasilan yang didapat.

Sumber: Data diolah

b. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

Variabel ini dikembangkan dari Teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) yaitu *Opportunity*. Indikator dalam variabel ini diadopsi dari COSO (*Comitee of Sponsoring Organization*) yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, standar pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sedangkan pertanyaan dalam kuisisioner dikembangkan dan dimodifikasi dari penelitian Pratomo, Pramuka, dan Maghfiroh (2016).

Tabel 3.4
Penjelasan Indikator Variabel Keefektifan SPI

No	Pernyataan	Keterangan
1	Telah dibuat dan dilaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pengelolaan kas di tempat kerja saya.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator lingkungan pengendalian
2	Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pengelola keuangan telah dilaksanakan secara rutin.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator penaksiran risiko
3	Pengguna dana telah membuat SPJ secara lengkap dengan benar dan tepat waktu.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator standar pengendalian.
4	Prosedur kerja telah diinformasikan dan dibuat dengan jelas serta dapat dimengerti.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator informasi dan komunikasi.
5	Pengecekan secara langsung atas pembelian barang/jasa sering dilakukan oleh atasan.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator pemantauan.

Sumber: Data diolah

c. Perilaku Tidak Etis

Variabel ini dikembangkan dari Teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) yaitu *Rationalization*. Indikator dalam variabel ini diadopsi dari penelitian Tang dan Chiu (2003) yang menyebutkan diantaranya: perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (*abuse position*), perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*) perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (*no action*). Pertanyaan yang mewakili indikator-indikator tersebut dikembangkan dan dimodifikasi dari penelitian Wilopo (2006).

Tabel 3.5
Penjelasan Indikator Perilaku Tidak Etis

No	Pernyataan	Keterangan
1	Pada suatu ketika saya menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi itu adalah hal biasa.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (<i>abuse position</i>).
2	Pada suatu saat saya menggunakan jam kerja untuk keperluan pribadi adalah sesuatu yang biasa terjadi.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumberdaya organisasi (<i>abuse resources</i>).
3	Jika saya menerima tiket berlibur keluar kota dari rekanan proyek agar proyeknya dimenangkan dalam tender adalah hal biasa.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse power</i>).
4	Saya tidak terganggu jika pegawai lain melakukan tindakan yang merugikan dilingkungan kerja.	Pertanyaan ini merupakan interpretasi dari indikator perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (<i>no action</i>).

Sumber: Data diolah

d. Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan

Variabel ini dikembangkan berdasarkan Teori *Fraud Diamond* (Wolfe dan Hermanson, 2004) yaitu *Capability*. Sasaran pengukuran variabel ini adalah

pegawai yang memiliki jabatan dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah

Daerah Kota Metro, diantaranya:

Tabel 3.6
Definisi Sasaran Pengukuran Variabel

No	Sasaran	Definisi	Keterangan
1.	Pengguna Anggaran (PA)	Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD	Kapasitas yang dimilikinya diantaranya: mengesahkan jumlah anggaran yang diusulkan SKPD yang dipimpinnya. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja serta mengadakan ikatan/kerjasama SKPD yang dipimpinnya dengan pihak lain.
2.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.	Kapasitas yang dimilikinya diantaranya: mengusulkan/menghapus berbagai jenis program/kegiatan yang ada di beberapa Bagian/Bidang tugas sebuah SKPD.
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Kapasitas yang dimilikinya diantaranya: merekomendasikan/menentukan rekanan/toko/penyedia jasa dalam pelaksanaan kegiatan.
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.	Kapasitas yang dimilikinya diantaranya: menggunakan/melaporkan penggunaan dana pada kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
5.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran	Jabatan yang memiliki kewajiban untuk melakukan dan melaksanakan serta melaporkan pertanggung jawaban belanja barang/jasa pemerintah.	Kapasitas yang dimilikinya diantaranya: membuat dan menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPTK.

Sumber: Data diolah

Indikator yang terdapat dalam variabel ini dikembangkan dari penelitian Wolfe dan Hermanson (2004), Gbegi dan Adebisi (2013), Rasha dan Andrew (2012) serta modifikasi dan penyesuaian dari penulis berdasarkan kondisi di lapangan.

Indikator-indikator tersebut diantaranya: *integrity, abuse of authority, ability to*

make policy, dan *ability to give pressure*. Pertanyaan-pertanyaan dari variabel ini dikembangkan penulis dari konsultasi dan diskusi dengan beberapa pegawai yang setingkat dengan responden diluar sampel penelitian.

Tabel 3.7
Penjelasan Indikator Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan

No.	Pernyataan	Keterangan
1	Memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada saya untuk melakukan pekerjaan.	Pernyataan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>integrity</i> . Dimana dengan keleluasaan yang sebesar-besarnya maka memungkinkan digunakan melewati batas kewajaran, sehingga dapat diukur tingkat integritas seorang pegawai dalam menduduki jabatan pengelola keuangan. Tingkat integritas yang rendah mencerminkan perilaku curang (<i>fraud</i>).
2	Memberikan keleluasaan seluas-luasnya dalam menentukan rekanan pengadaan barang/jasa.	Pernyataan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>abuse of authority</i> . Dengan keleluasaan yang seluas-luasnya dalam menentukan rekanan/pemilihan toko pembelian, dan penyedia barang/jasa memungkinkan untuk memilih tidak dengan proporsional dan jujur. Sehingga dapat diukur kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Jika keleluasaan itu digunakan seluas-luasnya maka ada indikasi kecenderungan <i>fraud</i> .
3	Memberikan kebebasan kepada saya untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan.	Pernyataan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>ability to make policy</i> . Dimana dengan kebebasan tersebut memungkinkan untuk membuat laporan yang tidak sesuai atau fiktif. Dengan jabatan yang dimiliki, dapat membuat kebijakan yang salah berdasarkan aturan dan norma yang berlaku, hal itu mengindikasikan perilaku <i>fraud</i> .
4	Memungkinkan saya untuk memberi perintah sesuai kemauan saya.	Pernyataan ini merupakan interpretasi dari indikator <i>ability to give pressure</i> . Dengan kemampuan memberi perintah yang sesuai dengan kemauan saya , maka dapat dimungkinkan seseorang memiliki kecenderungan untuk memberi tekanan kepada orang lain atau diri sendiri untuk melakukan manipulasi/ kecurangan (<i>fraud</i>).

Sumber: Data diolah

Berdasarkan penjelasan tentang variabel serta pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini maka perlu dijabarkan lebih luas tentang definisi operasional variabel seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya

<i>The Fraud Diamond Theory</i>	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Butir Pernyataan
<i>Incentive/pressure</i>	Tekanan	Persepsi tentang adanya tekanan dari kehidupan pribadi, lingkungan kerja, dan masyarakat. Indikator dalam variabel ini dikembangkan penulis dari Rasha dan Andrew (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personal pressure</i> 2. <i>Employment pressure</i> 3. <i>External pressure</i> 	1-6
<i>Opportunity</i>	Keefektifan sistem pengendalian internal	Persepsi tentang keefektifan proses pengendalian internal yang diterapkan dan dijalankan di lingkungan kerjanya. Indikator dalam variabel dikembangkan dari COSO (<i>Comitee of Sponsoring Organization</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penaksiran risiko 3. Standar Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan 	7-11
<i>Rationalization</i>	Perilaku tidak etis	Persepsi tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan didalam suatu instansi. Indikator dalam variabel dikembangkan dari Tang dan Chiu (2003)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (<i>Abuse position</i>) 2. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (<i>abuse resources</i>) 3. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse power</i>) 4. Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (<i>no action</i>) 	12-15
<i>Capability</i>	Jabatan dalam pengelola keuangan	Persepsi tentang kapasitas dalam menduduki jabatan dalam pengelola keuangan. indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrity</i> 2. <i>Abuse of authority</i> 3. <i>Ability to make policy</i> 4. <i>Ability to give</i> 	16-19

		variabel dikembangkan penulis dari Wolfe dan Hermanson (2004)	<i>pressure</i>	
<i>Fraud</i>	<i>Fraud</i>	Persepsi tentang pelanggaran dalam akuntansi. Indikator pengukuran yang dikembangkan Wilopo (2006) dari SPAP 316 IAI (2001) yang dimodifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manipulasi 2. Pemalsuan dokumen 3. Penghilangan informasi 4. Penggelapan aktiva 5. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi 	20-24

Sumber : Data Dimodifikasi (2016)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode survey, yaitu dengan cara pengumpulan data primer dari para responden yang terpilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian disusun dengan cara mengajukan pernyataan tertutup serta pilihan jawaban untuk disampaikan kepada responden penelitian. Dengan skala Likert penyusunan kuesioner penelitian terdiri dari 6 butir pernyataan variabel tekanan, 5 butir pernyataan variabel keefektifan sistem pengendalian internal, 4 butir pernyataan variabel perilaku tidak etis, 4 butir pernyataan variabel jabatan dalam pengelola keuangan, dan 5 butir pernyataan variabel *fraud*. Dari deskripsi operasional masing-masing variabel tersusun 24 item pernyataan untuk disampaikan kepada para responden yang menjadi sampel penelitian.
2. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengutip, dan memasuki berbagai informasi dan teori yang dibutuhkan untuk mengungkap masalah yang dijadikan obyek penelitian

dan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan merujuk pada buku-buku, dokumen-dokumen, dan materi tulisan yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan awal penelitian, termasuk penelitian pendahuluan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan usulan penelitian.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator

Uji validitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel laten. Validitas suatu indikator dapat dievaluasi dengan tingkat signifikansi pengaruh antara suatu variabel laten dengan indikatornya (Ghozali, 2012). Uji validitas dilakukan dengan analisis Lisrel 8.8 dengan kriteria jika nilai muatan faktornya (*loading factors*) lebih besar dari nilai 0,50 berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Uji reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai dimana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk / faktor laten yang umum. Dengan kata lain bagaimana hal-hal yang spesifik saling membantu dalam menjelaskan fenomena yang umum (Ferdinand, 2002). Untuk menguji reliabilitas digunakan analisis *Composite Reliability*. Nilai batas yang digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,7.

3.4.2 Pengukuran Model

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dilakukan dengan pendekatan uji statistik SEM (*Simultaneous Equation Model*). Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan. Pengujian ini dibantu menggunakan software Lisrel 8.8. Model Persamaan Struktural atau *Structural Equation Model (SEM)* adalah teknik-teknik statistika yang memungkinkan pengujian suatu rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan. Hubungan yang kompleks dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Mungkin juga terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang.

Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa variabel indikator. Demikian pula diantara variabel-variabel itu dapat berbentuk sebuah variabel tunggal yang diobservasi atau yang diukur langsung dalam sebuah proses penelitian. Ferdinand (2002) mengemukakan bahwa dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Umumnya terhadap berbagai jenis *fit index* yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesiskan dengan data yang disajikan. Peneliti diharapkan melakukan evaluasi model struktural (*struktural model*) secara keseluruhan dengan menilai kelayakan model melalui kriteria *goodness of fit* (Latan, 2012).

Beberapa indeks kesesuaian dan *cut-off value*-nya yang digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak seperti diuraikan berikut ini:

1) *Chi-Square Statistic (χ^2)*

Chi-square statistic merupakan kriteria *fit indices* yang dikembangkan oleh Joreskog (1969). Nilai *Chi-square* menunjukkan adanya penyimpangan antara *sample covariance matrix* dan model (*fitted*) *covariance matrix*. Nilai *Chi-square* hanya akan fit apabila asumsi normalitas data terpenuhi dan ukuran sampel adalah besar, karena itu bila jumlah sampel adalah cukup besar yaitu lebih dari 200 sampel, maka statistik *chi-square* ini harus didampingi oleh alat uji lainnya. Model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan bila nilai *chi-square* -nya rendah. Semakin kecil nilai *chi-square* -nya semakin baik model itu.

2) *GFI (Goodness of Fit Index)*

Indeks kesesuaian (*fit index*) ini akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang. *GFI* adalah sebuah ukuran non-statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor fit*) sampai dengan 1,0 (*perfect fit*). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah "*better fit*".

3) *AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index)*

AGFI adalah analog dari R^2 dalam regresi berganda. *Fit Index* disesuaikan terhadap *degrees of freedom* yang tersedia untuk menguji diterima tidaknya model. Indeks ini diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$AGFI = 1 - (1 - GFI) \cdot db/d$$

Dimana: db = jumlah sampel moment, dan d adalah *degrees of freedom*.

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90. Perlu diketahui bahwa baik GFI maupun AGFI adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari *varians* dalam sebuah matriks kovarians sampel. Nilai sebesar 0,95 dapat diinterpretasikan sebagai tingkatan yang baik *good overall model fit* (baik) sedangkan besaran nilai antara 0,90 - 0,95 menunjukkan tingkatan cukup (*adequate fit*).

4) RMSEA (*The Root Mean Square Error of Approximation*)

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan chi-square statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan *goodness-of-fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah *close fit* dari model itu berdasarkan *degrees of freedom*.

5) ECVI (*ExExpected Cross Validation Index*)

Digunakan untuk mengukur perbedaan antara matriks kovarian yang dicocokkan dalam sampel yang dianalisis dengan matriks kovarian yang diharapkan, dan diperoleh dari sampel lain dengan ukuran yang sama. Jika nilai ECVI terkecil maka model tersebut dapat direplikasi.

6) AIC (*Aikake's Information Criterion*)

Kriteria informasi Akaike adalah ukuran relatif kebaikan/fit dari model statistik.

Hal ini didasarkan pada konsep yang pada dasarnya menawarkan ukuran relatif dari informasi yang hilang ketika sebuah model yang diberikan digunakan untuk menggambarkan realitas. AIC tidak menguji model dalam bentuk dalam uji hipotesis nol, tetapi AIC mampu menunjukkan seberapa tepat model tersebut dengan data yang kita miliki secara mutlak. Model dinyatakan fit jika AIC lebih kecil dari AIC *Saturated* sebesar 756,00.

7) NFI (*Normed Fit Index*)

Indeks ini merupakan pembandingan antara proposed model dengan null model. NFI cenderung merendahkan nilai fit pada penggunaan sampel yang kecil. Nilai NFI yang direkomendasikan untuk indikasi model fit adalah $>0,90$.

8) CFI (*Comparative Fit Index*)

memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, mengindikasikan adanya *a very good fit*. Nilai yang direkomendasikan adalah $CFI > 0,90-0,95$. Indeks ini besarnya tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel, karena itu sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah model.

9) NNFI (*Non-Normed Fit Index*)

NNFI adalah nilai yang membandingkan model yang sedang diuji dengan null modelnya. Model dikatakan baik bila nilai NNFI nya minimal 0,90.

Dari penjelasan diatas, maka indeks-indeks yang dapat digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Goodness of Fit Index

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut Off Value</i>
Likelihood Chi Square	Diharapkan kecil
Probability	0,05
GFI	>0,90
AGFI	<0,90
RMSEA	0,08
ECVI Model	<5,95
AIC	756,00
NFI	0,9
CFI	0,9
NNFI	0,9

Sumber: Ferdinand (2014)

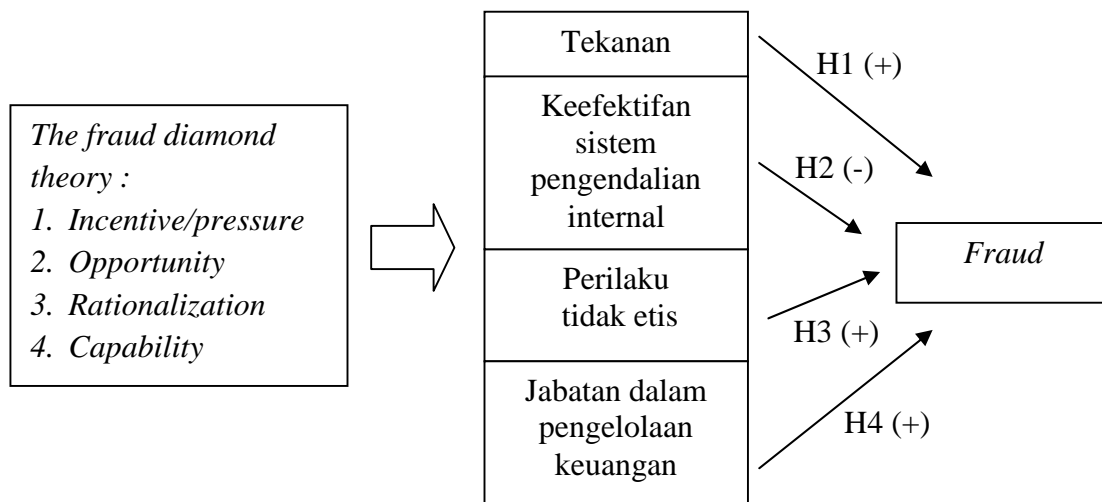
3.4.3 Uji Hipotesis

Seperti dijelaskan pada bab II, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri dari 4 hipotesis. Untuk mengetahui apakah hipotesis didukung oleh data atau tidak, maka nilai statistik t dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,96 (Ghozali, 2012). Apabila nilai $t_{hitung} > 1,96$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian didukung oleh data (terbukti secara signifikan).

3.5 Model Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *survey confirmatory research* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keberlakuan model yang didapat dari teori dan kajian penelitian terdahulu. Sumber data berasal dari pendapat dan persepsi para pejabat pengelola keuangan (pejabat pengadaan barang/jasa) di SKPD Pemerintah Kota Metro yang digali melalui kuesioner sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan metode tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.1
Kerangka Pemikiran



3.6 Analisis Tambahan

Gbegi dan Adebisi (2013) dalam penelitiannya “ *The New Fraud Diamond Model- How Can it Help Forensic Accountants in Fraud Investigation in Nigeria?*” memberikan saran menarik yang perlu ditindaklanjuti. Seorang akuntan forensik perlu memahami peluang dalam melakukan penipuan melalui *new fraud diamond model* untuk membantu dalam mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan dengan skema individu serta secara efektif menilai risiko penipuan (Gbegi dan Adebisi, 2013).

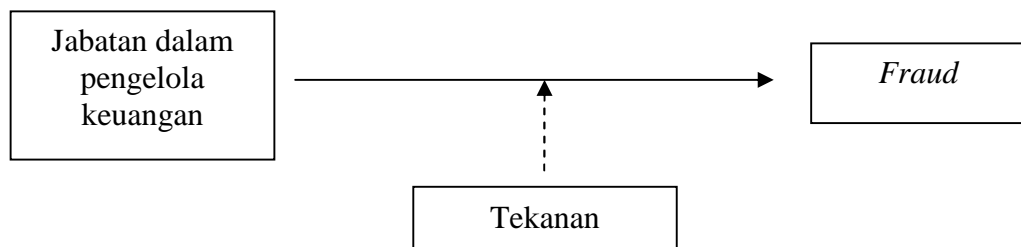
Guna mengakomodir pendapat dan saran dari Gbegi dan Adebisi (2013), serta mempertajam hasil analisis dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan model analisis tambahan yang secara tidak langsung dapat memberikan tambahan literatur tentang pengembangan teori *fraud* dan juga dapat menjadi acuan bagi

pemerintah daerah dalam mengendalikan *fraud*. Model analisis tambahan tersebut diantaranya:

1. Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap *fraud* dengan Tekanan sebagai variabel moderating.

(dengan asumsi bahwa semakin tinggi jabatan maka tekanan yang akan dihadapi semakin tinggi pula)

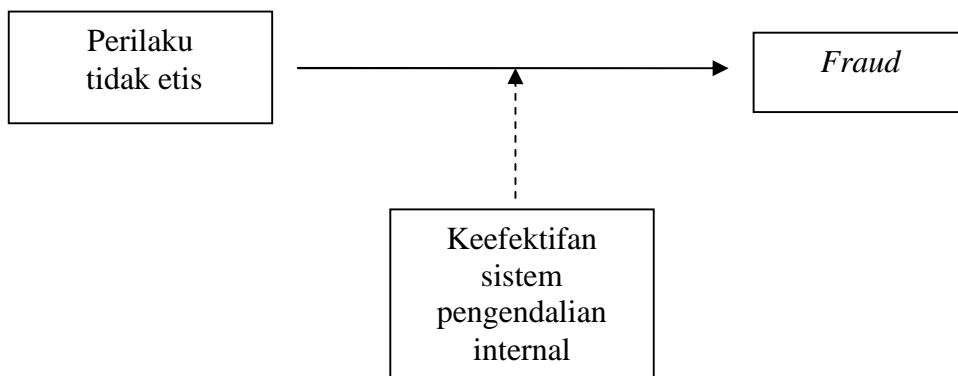
Gambar 3.2
Model I



2. Perilaku tidak etis terhadap *fraud* dengan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderating.

(dengan asumsi bahwa perilaku tidak etis semakin tinggi jika pengendalian internalnya lemah/tidak efektif)

Gambar 3.3
Model II



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa ke-4 hipotesis yang diajukan, semua didukung. Dimana tekanan berpengaruh positif terhadap *fraud*, artinya semakin besar tekanan pada pejabat/pegawai di Pemerintah Daerah Kota Metro, baik tekanan dari individu itu sendiri, lingkungan kerja, dan luar individu maka semakin tinggi kecenderungan *fraud*. Berbeda halnya pada keefektifan sistem pengendalian internal yang berpengaruh negatif terhadap *fraud*, berarti semakin besar keefektifan sistem pengendalian internal pada pejabat/pegawai di Pemerintah Daerah Kota Metro maka kecenderungan *fraud* akan semakin menurun. Sedangkan perilaku tidak etis dan jabatan dalam pengelolaan keuangan sama-sama berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini berarti semakin besar perilaku tidak etis maupun semakin tinggi kewenangan dalam pengelolaan keuangan pada pejabat/pegawai di Pemerintah Daerah Kota Metro maka semakin tinggi kecenderungan *fraud*.

Hasil ini diperkirakan karena adanya anggapan bahwa korupsi yang terjadi pada sektor pemerintahan merupakan sebuah sistem yang mendarah daging dilingkungan aparatur pemerintah, dimana mau tidak mau, suka tidak suka dapat melibatkan pejabat/pegawai, terutama yang bertugas sebagai pengelola keuangan daerah. Sehingga jawaban yang diberikan merupakan kondisi ataupun keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

5.2 Implikasi dan Saran

Hasil penelitian ini memberikan implikasi dalam upaya pemerintah mengatasi *fraud* yang sudah memprihatinkan. Fokus pendekatan dari hasil temuan yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas bahwa tekanan yang dirasakan pegawai, perilaku tidak etis yang sudah membudaya dan adanya kesempatan yang luas bagi pejabat/pegawai (jabatan) dibidang pengelolaan keuangan daerah, serta lemahnya pengendalian internal menyebabkan kecenderungan *fraud* menjadi lebih tinggi.

Dari temuan tersebut pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagai upaya meminimalisir atau memberangus *fraud* atau biasa disebut korupsi pada pemerintahan. Pemerintah perlu menekankan perhatian pada variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Kepala Daerah melalui melalui lembaga auditor internalnya (Inspektorat) dapat mengidentifikasi gejala, tanda-tanda, dan peluang sesuai temuan penelitian terhadap kecenderungan *fraud* di lingkungan pengelolaan keuangan daerah serta melakukan *fraud risk assessment* secara berkala sehingga tindakan *fraud* dapat dieliminasi.

Selanjutnya hal-hal yang dapat disarankan dari penelitian ini kepada Pemerintah Kota Metro, diantaranya yaitu gaji sebagai pegawai yang dirasa belum memenuhi semua kebutuhan hidup, sering menjadi alasan dan menjadi faktor untuk berbuat *fraud*, hal tersebut ternyata menjadi salah satu indikator pendukung hubungan positif antara tekanan terhadap *fraud*. Gaji yang disertai pemberian tunjangan maupun tambahan penghasilan, perlu dikaji kembali besarannya agar dapat mencukupi kebutuhan dan menjadi benteng pertahanan seorang pejabat/pegawai untuk menghindarkan diri dari kecenderungan *fraud*/korupsi. Hal tersebut perlu diimbangi dengan *punishment*/sanksi yang memberikan efek jera.

Punishment/sanksi yang dapat dilakukan diantaranya : 1) Hukuman yang berat serta denda yang jumlahnya signifikan; 2) Pemberhentian sebagai pegawai tanpa adanya jaminan pensiun; 3) Pengembalian hasil korupsi kepada kas negara; 4) Penerbitan data dan informasi pelaku korupsi pada buletin pemerintah.

Selain itu faktor terbesar timbulnya tekanan yang terjadi pada pejabat/pegawai di lingkungan kerja pengelolaan keuangan pada SKPD di Kota Metro adalah pergaulan di masyarakat sehingga ingin dihormati. Pimpinan hendaknya memberikan contoh yang baik, agar berperilaku sederhana dan menghindari perilaku yang boros dan bergaya hidup mewah, sehingga tekanan-tekanan dari luar individu atau lingkungan sosial yang dirasakan dapat dieliminasi dengan baik.

Kecenderungan *fraud* dapat diminimalisir dengan menumbuhkan kesadaran pegawai melalui pembinaan yang ada pada sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). SPIP diharapkan mampu menjangkau seluruh tingkatan jabatan di pemerintahan, guna memberikan pemahaman bahwa dampak dari *fraud*/korupsi sangat merusak bahkan mematikan fungsi dari pemerintah yaitu sebagai pemberi jaminan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh kepada SKPD hendaknya dilakukan dengan cara yang tegas, tanpa adanya rasa canggung akibat faktor psikologis bawahan dan atasan yang selama ini terjalin hubungan baik. Namun dalam penegakan etika, seorang pemimpin harus peduli dan berani memberikan hukuman kepada bawahan yang melakukan kesalahan.

Korupsi yang sudah melekat bagaikan sebuah sistem, sehingga memaksa pejabat/pegawai melakukan korupsi perlu diantisipasi dengan pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diupayakan menjadi salah satu prasyarat seorang pegawai menduduki jabatan, baik jabatan struktural maupun pengelola keuangan. Sehingga dengan adanya kompetensi tentang bagaimana dan cara menghindari korupsi dapat memberikan proteksi bagi pejabat/pegawai tersebut agar terhindar dari korupsi.

Berdasarkan analisis tambahan yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dapat lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan *fraud*/korupsi. Pencegahan dan pemberantasan *fraud*/korupsi dapat dilakukan lebih tepat dengan menganalisa moderasi yang mempengaruhi kecenderungan *fraud*/korupsi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya: hasil yang belum maksimal pada saat menguji variabel “Jabatan dalam Pengelola Keuangan terhadap *Fraud*”, untuk itu perlu adanya pengelompokan responden berdasarkan jabatan pada pengelola keuangan (PA/KPA, PPK, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran), sehingga jawaban pada setiap kelompok jabatan dapat dipisahkan guna mempertajam dan mengurangi hasil yang bias.

Data penelitian berasal dari persepsi responden yang disampaikan dalam bentuk instrument kuesioner. Guna memaksimalkan hasil yang didapat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan teknik wawancara sehingga kondisi

yang mungkin berbeda-beda disetiap responden dapat diketahui. Selain itu model penelitian kedepan hendaknya menggunakan variabel moderating dalam menguji faktor-faktor yang menyebabkan *fraud*, hal ini terbukti dalam analisis tambahan yang disajikan dalam penelitian ini bahwa hasil yang didapat semua signifikan pada variabel moderatingnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. 1987. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta. LP3ES.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., dan Albrecht, C.O. (2008). Fraud and Corporate Executives: Agency, Stewardship and Broken Trust. *Journal of Forencis Accounting, Vol.V (2004), pp.109-130*.
- Arens, A. A., dan Loebbecke, James K. 2003. *Auditing; An Integrated Approach*, 8th edition, Englewood Cliff, New Jersey, Prentice Hall.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Azhar, M. 2003, *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
- Beu, D., dan Buckey, M.R.. 2001. The Hyphothesized Relationship Between Accountability and Ethical Behavior. *Journal of Business Ethics*, 34: 57-73.
- Beasley M.S. 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, Vol 71 No. 4, pp 443-465.
- Bologne, J., dan Robert. 1993. *Handbook of Corporate Fraud*. Butterworth-Heinemann. Boston.
- Buckley, M. R., D. S. Wiese., M. G. Harvey, 1998. An Investigation into Dimensions of Unethical Behavior. *Journal of Education for Bussiness* 73 (5), pp: 284-290.
- Coram, P., Ferguson, C., dan Moroney, R. 2006. The Value of Internal Audit in Fraud Detection, *Working Paper Merbourne Research*, The University of Melbourne.
- COSO. 1992. Guidance on Monitoring Internal Control Systems, *The American Institute of Certified Public Accountant*.
- Cressey, D. 1953. Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.

- Dandago, K.I. 1997. "Fraud Detection and Control at Local Government Level": *Journal of the National Association of Nigeria*, vol.7, No.4.
- Erickson, M., Hanlon, M., dan Maydew, E. 2006. Is There a Link Between Executive Compensation and Accounting Fraud? *Journal of Accounting Research*, Vol 44 Issue 1 pages 113-143.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian untuk Skripsi, Tesis Magister dan Disertasi Doktor* (5 ed.). Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gay, L.R., dan Diehl, P.L. 1996. *Research Methods for Business and Management*. Macmillan.
- Gbegi, D.O., dan Adebisi, J.F. 2013. The New Fraud Diamond Model-How Can It Help Forensic Accountants In Fraud Investigation In Nigeria?. *Journal of Accounting Auditing and Fiancé Research*, Vol.1, No. 4, pp.129-138.
- Ge, Weili., dan McWay, S. 2005. The Disclosure of Material Weaknesses in Internal Control after the Sarbanes-Oxley Act, *Accounting Horizons*, Vol. 19 No. 3 pp 137-158.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hall, J. A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ketiga. Terjemahan Amir Abadi Yusuf, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Auditing Seksi 319. Pertimbangan atas Pengendalian Internal Intern dalam Audit Laporan Keuangan.
- Joreskog, K.G. 1973. A General Method for Estimating a Linear Structural Equation System, *In Structural Equation Models in the Social Sciences*, Goldberger, AS. And O.D Duncan (eds), Academic Pres, New York, pp. 185-112.
- Krismadji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. AMP YKPN: Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. *Memahami Untuk Membasmi*; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Latan, Hengky. 2012. *Struktural Equation Modeling: Konsep dan Aplikasi Menggunakan Program Lisrel 8.80*. Alfabeta, Bandung.

- Lister, L.M. 2007. *A Practical Approach to Fraud Risk: Internal Auditors*, 64:6, 1-30.
- Maroney, J. J. Roselie, E.M. 2008. The Effect of Moral Reasoning on Financial Reporting Decisions in Post Sarbanes-Ocley Environment, *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 20 No, 2 pp 89-`0.
- Mathis, R. L., dan Jacson, J. H. 2002. *Human Resource Management*, alih Bahasa. Jakarta: Salemba Empat.
- Murdock, H. 2008. *The Three Dimensions of Fraud: Internal Auditors*. Retrieved on September 22, 2013 from www.emerald.com.
- Mustikasari. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765
- Najahningrum, A. F. 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.
- Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan Keempat, Jakarta.
- Nasir, R. 2006. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press & LKiS.
- Pratomo, A., Pramuka, B. A., dan Maghfiroh, S. 2016. Analisis *Fraud Diamond* Terhadap Kecenderungan Perilaku *Fraud* pada Pengelola Keuangan Pemerintah. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Rae, K., dan Subramaniam, N. (2008). "Quality of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organizational Justice and Employee Fraud": *Managerial Auditing Journal*, Vol.23(2): Retrieved from www.emerald.com on September 30, 2013.
- Randa, F., dan Meilina. 2009. Pengaruh Kefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi* Vol 7 No 2 Oktober 2009, 53-85.
- Rasha, K., dan Andrew, H. 2012. "The New Fraud Triangle": *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, vol.3(3): Retrieved from google.com on October 3, 2013.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008* Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003* Tentang Keuangan Negara.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005* Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010* Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Robinson, S. L., dan Bennet, R. J. 1995. A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. *Academy of Management Journal*, vol. 38, no. 2 pp: 555-572
- Scoot, W. R. 2003. *Fianancial Accounting Theory*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Silverstone, H., dan Sheetz, M. 2007. *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts 2nd Edition*, John Wiley & Sons Inc, Ney Jersey.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesepuluh, Alfabeta, Bandung.
- Tang, T. L. P., dan Chiu, R. K. 2003. Income, Money Etic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46, pp: 13-30.
- Thoyibatun, S., Made Sudarma, Eko Ganis. 2009. Analysing The Influence of Internal Control Compliance and Compensation System Against Unethical Behavior and Accounting Fraud Tendency, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Thoyibatun. 2012. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 16 No. 2 Juni 2012, 245-260.
- Tunggal, A.W. 2010. *Dasar-Dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru*. Harvarindo: Jakarta.
- Tunggal, A. W. 2011. *Pengantar Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo

- Vona, L.W. 2008. *Fraud Risk Assessment: Building a Fraud Audit Programme*: Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.
- Wells, J. 1997. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*. Hoboken, New Jersey. Wiley.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Wilopo. 2008. Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan: Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Ventura*, Vol. 11 no. 1 April 2008.
- Wolfe, D. T., dan Hermanson, D. R. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, Vol. 74 Issue 12, p38.
- Zulkarnain, R. M. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765.